



**LKIP**  
**(LAPORAN KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN**  
**RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, penilaian hasil kinerja dan transparansi serta wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 merupakan rangkaian periode Rencana Strategis 2023 – 2026. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah gambaran kinerja dari seluruh unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dengan mengevaluasi dan menganalisis kinerja pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Melanjutkan sasaran tahun sebelumnya, rencana kinerja tahun 2023 ini ditetapkan dalam pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja utama.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan dan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, diharapkan laporan ini dapat menjadi dasar evaluasi untuk menciptakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan yang lebih baik. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 ini.

Buntok, 13 Pebruari 2024

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BARITO SELATAN



**Dr. ITA MINARNI, ST., MT**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19790812 200802 2 001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023. LKIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappeda senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan – catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai PAPBD Tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan mengelola anggaran sebesar Rp 254.271.806.781,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 46.214.136.076,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 208.057.670.705,00. Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja hibah. Sedangkan Belanja Modal digunakan unruk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Realisasi keuangan belanja operasi sebesar 93,02% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 42.989.354.238,99. Realisasi keuangan belanja modal sebesar 90,94% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 189.206.033.684,00. Perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2023 adalah realisasi fisik sebesar 91,32%. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dapat dikategorikan berhasil.



LKIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Buntok, 13 Pebruari 2024

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BARITO SELATAN



**Dr. ITA MINARNI, ST., MT**

Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19790812 200802 2 001



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
Ikhtisar Eksekutif .....	3
Daftar Isi .....	5
BAB I Pendahuluan .....	6
A. Latar Belakang .....	6
B. Maksud dan Tujuan .....	7
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.....	7
D. Keuangan .....	16
E. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	19
A. Perencanaan Strategis .....	19
B. Tujuan dan Sasaran.....	20
C. Perjanjian Kinerja .....	21
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023.....	24
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	36
A. Pengukuran Kinerja .....	36
B. Analisis Capaian Kinerja .....	37
BAB IV Penutup .....	66
Lampiran	
Pernyataan Penetapan Kinerja	
Perjanjian Kinerja	



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam iklim demokrasi dan semangat reformasi, tuntutan akan pemerintahan yang baik semakin tinggi. Semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara adalah berupa tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip good governance. Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidi dan evaluasi kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam hal ini wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.



## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Untuk mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih focus, efektif efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

## C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

### a. Kedudukan, Tugas, Fungsi

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada poin 1 dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas sebagaimana dimaksud pada poin 1 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas



pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 3 menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Bina Marga;
- 4) Bidang Sumber Daya Air;
- 5) Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- 6) Bidang Penataan Ruang;
- 7) Bidang Bina Jasa Konstruksi;
- 8) Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- 9) Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan Konstruksi;
- 10) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 11) Jabatan Fungsional.

Adapun penjelasan tentang pejabat tersebut adalah:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, menngvaluasi dan melaporkan pelaksanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, penyelenggaraan pembinaan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Ruang, Bina Jasa Konstruksi serta Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman.



- b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrative serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas. Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Subbagian Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, Menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan serta kepegawaian. Kepala subbagian umum sebagai Pejabat Penilai kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Subagian Keuangan mempunyai tugas menghimpun dan Menyusun, mengelola, membukukan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Kepala subbagian keuangan sebagai Pejabat Penilai kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- e. Bidang Sumberdaya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengamanan sumber daya air, operasional, pemeliharaan daya air serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kepala Bidang Sumber Daya Air sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- f. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepa dinas. Kepala Bidang Bina Marga sebagai Pejabat



- Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- g. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  - h. Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas Menyusun bahan peumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengaturan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penataan Ruang, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kepala Bidang Penataan Ruang sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  - i. Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, Pemberdayaan Jasa Konstruksi, Pengawasan Jasa Konstruksi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  - j. Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman mempunyai tugas Menyusun bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Bangunan dan Pengembangan Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan, Pengembangan Permukiman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Permukiman sebagai Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

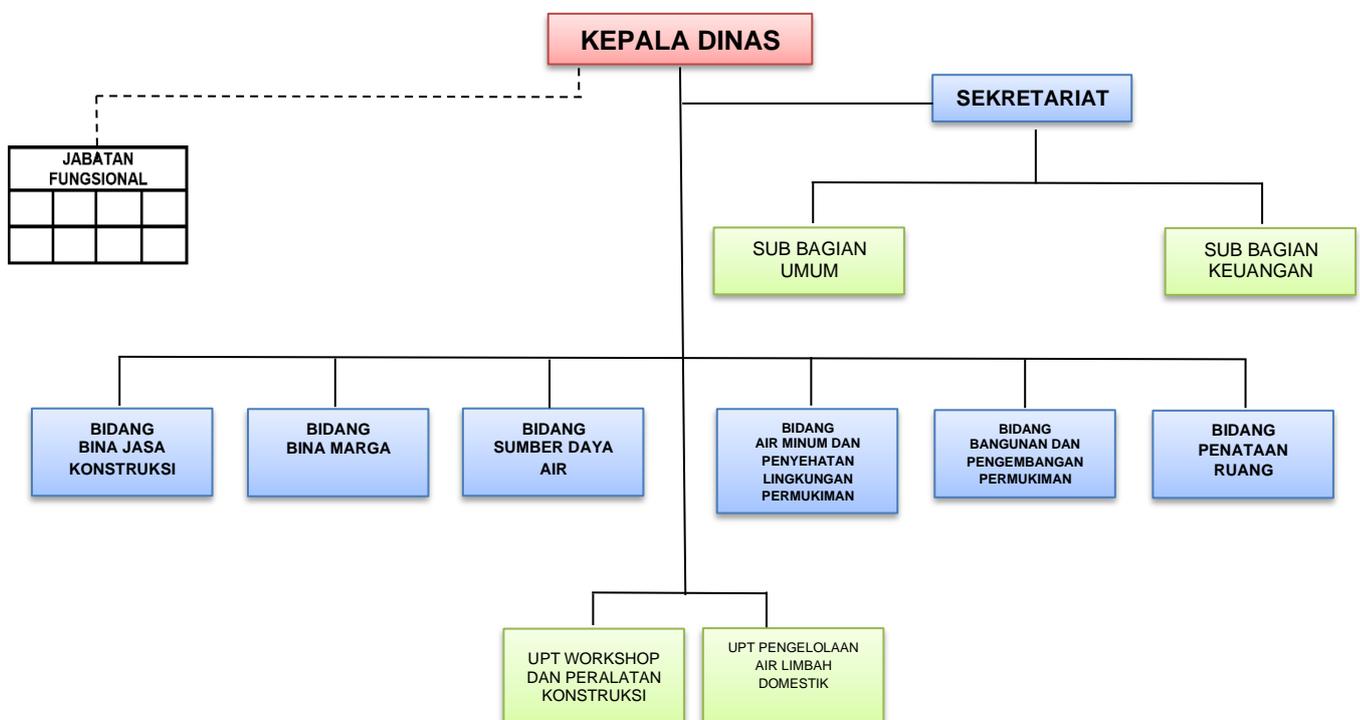


- k. Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan Konstruksi di bentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas. Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- l. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik di bentuk untuk melaksanakan kegiatan operasional Dinas dibidang pengelolaan air limbah domestik. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023



— Garis Komando

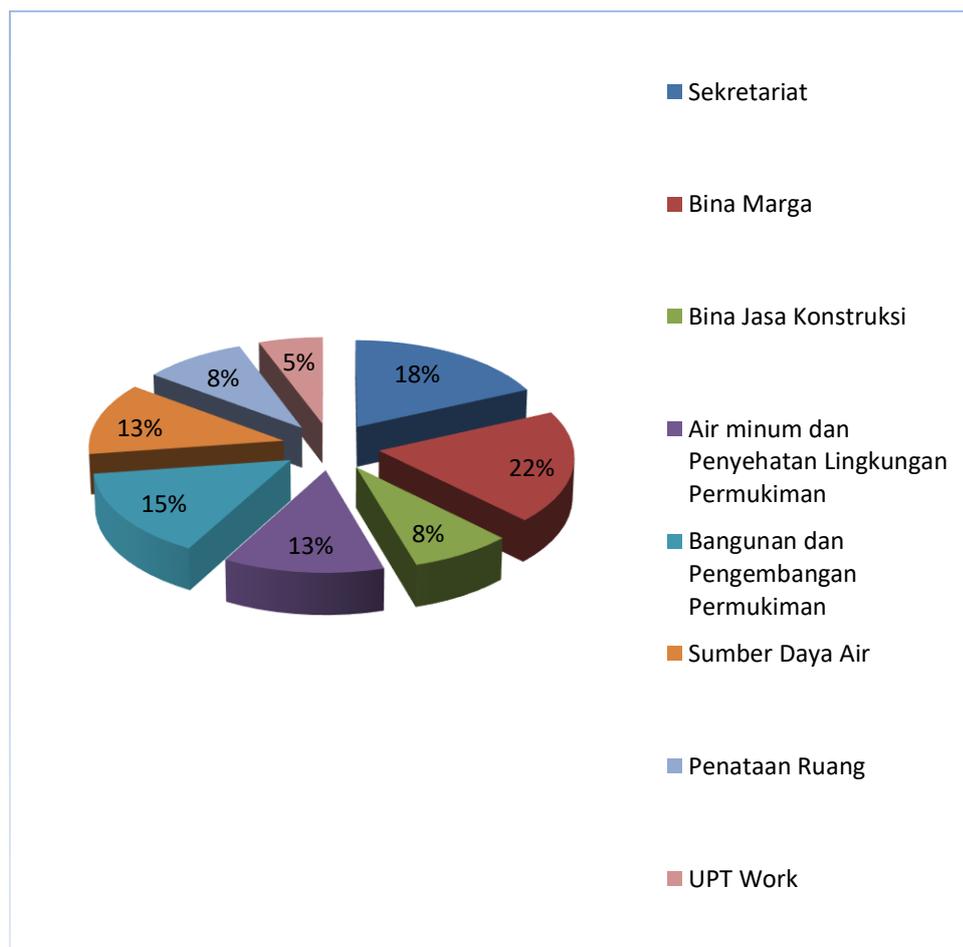
## Garis Koordinasi Administratif

## 2. Dukungan Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sampai akhir tahun 2023 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (data per 31 Desember 2023). Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja (Sekretariat, Bidang, UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi) disajikan pada gambar 1 berikut ini :

**Gambar I.1.**

**Grafik Jumlah Pegawai Dinas PUPR Kab.Barito Selatan pada Sekretariat, Bidang, UPT Workshop dan Peralatan Konstruksi dan UPT Pengelolaan Limbah Domestik Per-31 Desember 2023**



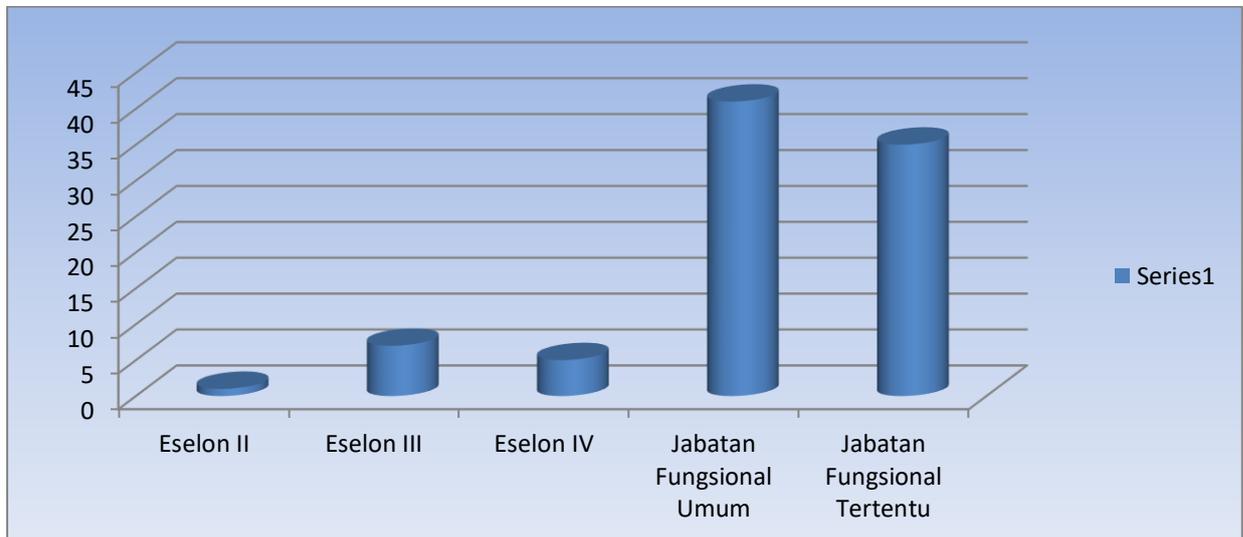
*Sumber data: Daftar Nominatif Pegawai Dinas PUPR Kab.Barito Selatan Tahun 2023*



Adapun jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, tingkat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pangkat/golongan dan jenis kelamin disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel I.1. Jumlah Pegawai Dinas PUPR Kab. Barito Selatan berdasarkan Pejabat Eselon dan Fungsional per 30 Desember 2022**

No	Jenis Jabatan	Jumlah Org
1	Jabatan Struktural	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	7
	c. Eselon IV	5
2	Jabatan Fungsional Umum	41
3	Jabatan Fungsional Tertentu	35
	<b>Jumlah</b>	<b>89</b>



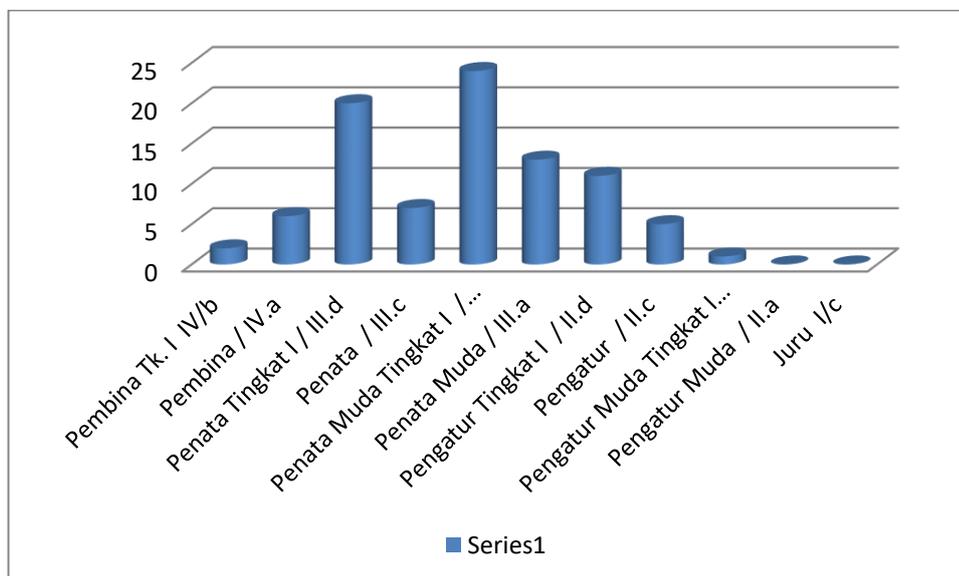
*Sumber data: Daftar Nominatif Pegawai Dinas PUPR Kab. Barito Selatan Tahun 2023*



**Tabel I.2. Jumlah Pegawai Dinas PU dan Penataan Ruang Kab.Barito Selatan berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2023**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Org
1	Pembina / IV.b	2
2	Pembina / IV.a	6
3	Penata Tingkat I / III.d	20
4	Penata / III.c	7
5	Penata Muda Tingkat I / III.b	24
6	Penata Muda / III.a	13
7	Pengatur Tingkat I / II.d	11
8	Pengatur / II.c	5
9	Pengatur Muda Tingkat I / II.b	1
Jumlah		89

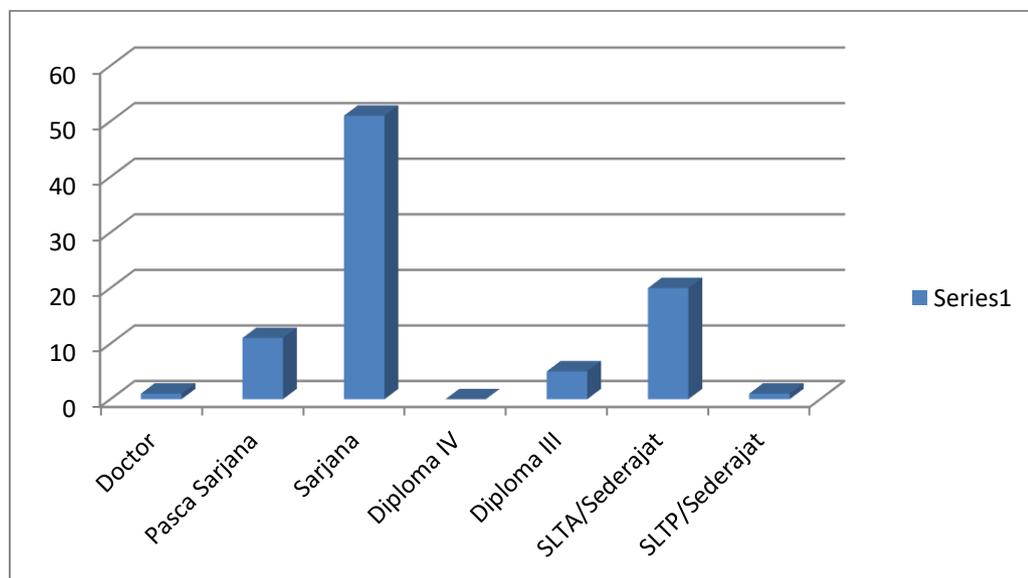
Sumber data: Daftar Nominatif Pegawai Dinas PUPR Kab.Barito Selatan Tahun 2022





**Tabel I.3. Jumlah Pegawai Dinas PU Kab.Barito Selatan Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023**

No	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Org
1	Doctor	1
2	Pasca Sarjana	11
3	Sarjana	51
4	Diploma IV	0
5	Diploma III	5
6	SLTA/Sederajat	20
7	SLTP/Sederajat	1
	<b>Jumlah</b>	<b>89</b>



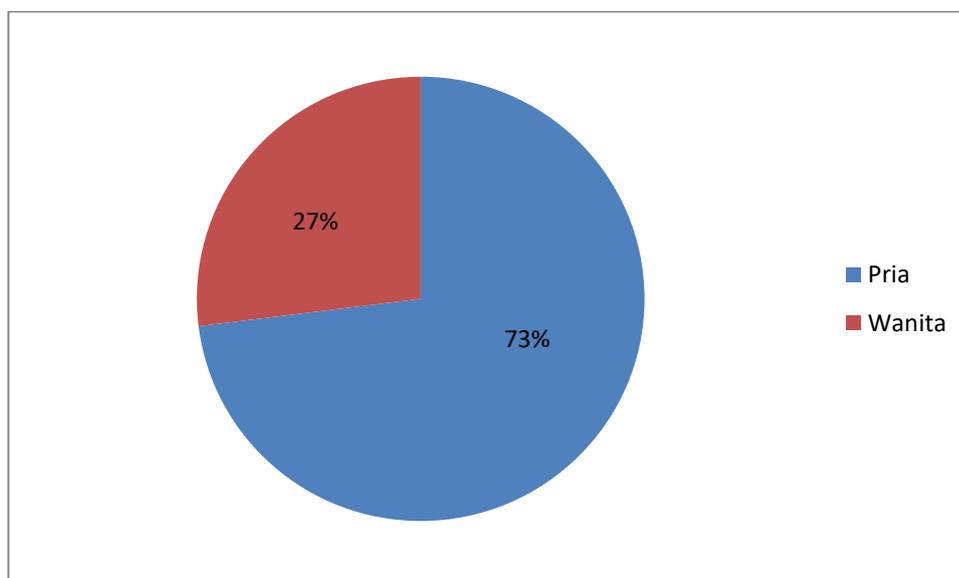
Sumber data: Daftar Nominatif Pegawai Dinas PUPR Kab.Barito Selatan Tahun 2022



**Tabel I.3. Jumlah Pegawai Dinas PUPR Kab.Barito Selatan Berdasarkan Gender per 31 Desember 2022**

No	Gender	Jumlah Org
1	Pria	65
2	Wanita	24
	<b>Jumlah</b>	<b>89</b>

*Sumber data: Daftar Nominatif Pegawai Dinas PUPR Kab.Barito Selatan Tahun 2023*



#### **D. Keuangan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp. 230.296.806.781,00 dari APBD Murni Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023. Setelah Perubahan Anggaran, Pagu Anggaran Bertambah Rp. 23.975.000.000,00 menjadi 254.271.806.781,00 dengan rincian disajikan pada Tabel I.5



**Tabel I.5. Jumlah Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan yang dikelola  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan  
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan
4.	Pendapatan		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 600.000.000,00	Rp. 2.385.000.000,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	Rp. 600.000.000,00	Rp. 2.385.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp. 600.000.000,00	Rp. 2.385.000.000,00
5	Belanja Daerah		
	Belanja Operasi	Rp. 36.961.108.768,00	Rp. 46.214.136.076,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 8.273.324.661,00	Rp. 8.267.556.461,00
5.1.02	Belanja Barang Jasa	Rp. 28.687.784.107,00	Rp. 37.946.579.615,00
	Belanja Modal	Rp. 193.335.698.013,00	Rp. 208.057.670.705,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 3.760.285.413,00	Rp. 4.555.321.642,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 40.052.160.000,00	Rp. 46.492.350.100,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 149.523.252.600,00	Rp. 157.009.998.963,00
	Jumlah Belanja	Rp. 230.296.806.781,00	Rp. 254.271.806.781,00

*Sumber Data : DPPA DPUPR Barsel TA.2023*



## **E. Sistematika Pembahasan**

Ikhtisar Eksekutif

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dan sekilas pengantar lainnya.

### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan sasaran strategi, kebijakan serta program-program pembangunan Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan

Lampiran - lampiran.



## BAB II

# PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 adalah:

***"Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa"***

Melalui sinkronisasi dan harmonisasi dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 maka Misi RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah:

**MISI 1 :** Mempercepat Pengembangan Dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif Dan Berwawasan Lingkungan

**MISI 2:** Memperkuat Ketahanan Daerah Dan Kondisi Politik, Meningkatkan Pelayanan Sosial, Permukiman Dan Mengantisipasi Perubahan Global

**MISI 3:** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi

**MISI 4:** Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing

**MISI 5:** Mewujudkan Barsel Yang Beriman, Berbudaya Dan Berkesetaraan Gender

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjalankan tugas dalam misi 1, 2 dan 3.

Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan pada bab sebelumnya dan tugas serta fungsi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan untuk periode 2023-2026 menetapkan 4 (empat) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas wilayah;
2. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat;
4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kurun waktu 2023 - 2026. Berikut adalah tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 - 2026:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah.
  - a. Meningkatnya konektivitas wilayah.
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.
  - a. Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah kabupaten.
3. Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat.
  - a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat.
4. Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif
  - a. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.

Secara lengkap, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel II.1

**Tabel II.1**

**Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Misi 1 : Mempercepat pengembangan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;		
NO	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah;	Meningkatnya konektivitas wilayah;
2	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan;	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten;
Misi 2 : Memperkuat ketahanan daerah dan kondisi politik, meningkatkan pelayanan social, permukiman dan mengantisipasi perubahan global;		
NO	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat;	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat;
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi;		
NO	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif;	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel;

Sumber: Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023-2026

**C. Perjanjian Kinerja**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Selatan 2023-2026, maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasi pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja dapat dilihat pada table II.2.



**Tabel II.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Target
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP DPUPR	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kriteria Kementerian PAN dan RB	B
		Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada DPUPR	Progres kemajuan perda RDTR	100,00
2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Perbandingan Panjang jalan kabupaten kondisi baik dengan Total panjang jalan kabupaten (SK jalan kabupaten) x 100%	36,60
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Perbandingan Panjang jembatan kabupaten kondisi baik dengan Total panjang jembatan kabupaten x 100%	51,25
3	Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan terhadap RTRW	Perbandingan luas pemanfaatan ruang sesuai RTRWK dengan luas RTRWK x 100%	25,00
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Air Bersih	Perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak dengan Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten x 100%	51,35
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Perbandingan Jumlah kawasan strategis yang memiliki infrastruktur permukiman dalam kondisi baik dengan Jumlah total infrastruktur permukiman kawasan strategis kabupaten x 100%	1,25
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Perbandingan Jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dengan Jumlah	65,73



			total rumah tangga di seluruh kabupaten x 100%	
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Perbandingan Luas irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dengan Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100%	35,17

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dapat dijabarkan pada table II.3, sebagai berikut:

**Tabel II.3**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023**  
**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Mempercepat pengembangan dan pemerataan pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas wilayah
	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten
Memperkuat ketahanan daerah dan kondisi politik, meningkatkan pelayanan social, permukiman dan mengantisipasi perubahan global	Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel



#### D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 230.296.806.781,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah). Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan. Oleh karena itu, alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 254.271.806.781,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai mana tabel II.4.

**Tabel II.4**  
**Rincian Anggaran Tahun 2023**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b><i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
1.03.01.2.01	<b><i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>			
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	300.000.000	150.000.000
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	25.000.000	25.000.000	0
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	25.000.000	25.000.000	0
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	25.000.000	25.000.000	0
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	25.000.000	25.000.000	0
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	78.502.000	28.502.000
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	130.000.000	80.000.000
1.03.01.2.02	<b><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>			
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.449.457.461	7.449.457.461	0
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	416.200.000	436.200.000	20.000.000



1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	20.000.000	0
-----------------	---	------------	------------	---

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.000.000	28.000.000	3.000.000
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	150.000.000	175.000.000	25.000.000
1.03.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>			
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	32.000.000	7.000.000
1.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	40.000.000	15.000.000
1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	75.000.000	25.000.000
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	27.000.000	7.000.000
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	61.920.000	61.920.000	0
1.03.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	156.590.000	156.590.000	0
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	15.500.000	5.500.000
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.000.000	62.000.000	47.000.000
1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	14.000.000	4.000.000
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	73.854.000	23.854.000
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	113.127.000	156.080.000	42.953.000
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	110.100.000	87.600.000	(22.500.000)
1.03.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	35.000.000	10.000.000



1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	80.000.000	15.000.000
-----------------	--	------------	------------	------------

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	20.000.000	0
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	300.000.000	100.000.000
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.158.906	66.358.873	10.199.967
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	55.000.000	5.000.000
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	471.000.000	171.000.000
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	20.000.000	0
1.03.01.2.07	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>			
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	1.556.000.000	1.427.000.000	(129.000.000)
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	136.369.050	136.369.050	0
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.683.250	775.535.750	646.852.500
1.03.01.2.08	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>			
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	8.000.000	3.000.000
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	863.800.000	985.415.748	121.615.748
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.000.000	142.497.000	33.497.000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	903.400.000	950.000.000	46.600.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.03.01.2.09	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>			



1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	268.915.000	168.915.000
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.140.000	77.620.000	40.480.000
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	190.000.000	238.375.000	48.375.000
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	20.000.000	25.680.000	5.680.000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	199.870.000	99.870.000
<b>II</b>	<b><i>Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( SDA )</i></b>			
1.03.02.2.01	<b><i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	25.000.000	20.270.000	(4.730.000)
1.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	25.000.000	20.270.000	(4.730.000)
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	25.000.000	120.270.000	95.270.000
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	644.000.000	905.154.900	261.154.900
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	300.000.000	291.000.000	(9.000.000)
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	500.000.000	685.000.000	185.000.000
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	3.700.000.000	3.614.850.000	(85.150.000)
1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas WS Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	20.270.000	(4.730.000)
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota	50.000.000	36.240.000	(13.760.000)
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	25.000.000	20.270.000	(4.730.000)
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	50.000.000	37.100.000	(12.900.000)



1.03.02.2.01.65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	100.000.000	0	(100.000.000)
1.03.02.2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan HIIdup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	550.000.000	736.139.600	186.139.600
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	500.000.000	487.500.000	(12.500.000)
1.03.02.2.02.04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	1.970.000.000	1.915.425.000	(54.575.000)
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000	199.900.000	(100.000)
1.03.02.2.02.10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	1.190.000.000	1.459.800.000	269.800.000
1.03.02.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	5.739.108.000	5.739.108.000	0
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100.000.000	0	(100.000.000)
1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	500.000.000	600.000.000	100.000.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>			
1.03.03.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota</b>			
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	837.346.100	1.151.811.000	314.464.900
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	668.000.000	656.700.000	(11.300.000)
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.650.000.000	6.563.469.763	(86.530.237)
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.000.000.000	1.065.550.000	65.550.000
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.600.000.000	1.676.339.000	97.539.000
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.000.000.000	2.904.500.000	(95.500.000)
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.600.000.000	2.599.800.000	(200.000)



<b>IV</b>	<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>			
1.03.04.2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPS/SPA/TPS 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	450.000.000	480.000.000	30.000.000
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPS/SPA/TPS 3R/TPS	1.064.000.000	1.305.500.000	241.500.000
<b>V</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>			
1.03.05.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	387.368.127	377.721.850	(9.646.277)
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	35.627.887	35.627.887	0
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	985.000.000	985.000.000	0

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	150.000.000	150.000.000	0
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	127.650.000	79.550.000	(48.100.000)
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100.000.000	100.000.000	0
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	200.000.000	199.850.000	(150.000)
<b>VI</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>			
1.03.06.2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000	99.900.000	(100.000)
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	800.000.000	790.450.000	(9.550.000)



1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	300.000.000	299.800.000	(200.000)
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	200.000.000	199.800.000	(200.000)
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Drainase	200.000.000	200.000.000	0
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	300.000.000	299.800.000	(200.000)
1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	200.000.000	199.850.000	(150.000)
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>			
1.03.07.2.01	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	8.632.730.000	13.300.785.000	4.668.055.000
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	87.500.000	730.000	(86.770.000)
1.03.07.2.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	30.000.000	230.000	(29.770.000)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>VIII</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>			
1.03.08.2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>			
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	475.000.000	554.165.000	79.165.000
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	16.059.360.000	18.941.605.300	2.882.245.300
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kab/Kota	20.000.000	3.293.000	(16.707.000)



1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	1.222.000	(28.778.000)
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	30.650.000	(19.350.000)
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan Milik Pemerintah Kab/Kota	10.000.000	18.860.000	8.860.000
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis Bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	130.000	(4.870.000)
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kab/Kota	5.000.000	130.000	(4.870.000)
1.03.08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Pemilik Gedung	15.000.000	15.000.000	0
1.03.08.2.01.10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	15.000.000	1.550.000	(13.450.000)
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	15.000.000	15.000.000	0
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	1.652.310.000	5.266.867.000	3.614.557.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>IX</b>	<b><i>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</i></b>			
1.03.09.2.01	<b><i>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	454.000.000	533.040.000	79.040.000
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	50.000.000	200.000	(49.800.000)
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	24.000.000.000	24.991.732.000	991.732.000



1.03.09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	20.000.000	1.080.000	(18.920.000)
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	20.000.000	9.680.000	(10.320.000)
<b>X</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>			
1.03.10.2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>			
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.032.895.500	3.793.546.500	2.760.651.000
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	600.000.000	600.000.000	0
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	9.000.000.000	9.717.500.000	717.500.000
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	2.000.000.000	1.954.700.000	(45.300.000)
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	81.140.200.000	83.918.816.600	2.778.616.600
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.520.000.000	3.334.062.199	1.814.062.199
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	7.900.000.000	7.893.800.000	(6.200.000)
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	1.195.000.000	1.276.900.000	81.900.000
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	50.000.000	250.000.000	200.000.000
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.011.829.500	1.318.620.300	306.790.800
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	6.200.736.000	6.150.460.000	(50.276.000)
1.03.10.2.01.24	Pembangunan Jalan Strategis Desa	4.950.000.000	5.009.500.000	59.500.000
1.03.10.2.01.25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	6.300.000.000	6.129.150.000	(170.850.000)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>XI</b>	<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>			
1.03.11.2.01	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>			
1.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	20.000.000	20.000.000	0



1.03.11.2.01.02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0
1.03.11.2.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	10.000.000	10.000.000	0
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	75.000.000	375.000.000	300.000.000
1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	10.000.000	10.000.000	0
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi	75.000.000	75.000.000	0
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	25.000.000	25.000.000	0
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	25.000.000	25.000.000	0
1.03.11.2.02	<b><i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	42.200.000	42.200.000	0
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	15.000.000	15.000.000	0
1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	25.000.000	25.000.000	0
1.03.11.2.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat dilaksanakan dengan Skema KPCBU	10.000.000	10.000.000	0
1.03.11.2.02.05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Resiko Investasi Infrastruktur	15.000.000	15.000.000	0
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	10.000.000	10.000.000	0

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Kebersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	175.000.000	175.000.000	0
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	20.500.000	20.500.000	0



1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	15.000.000	15.000.000	0
1.03.11.2.02.10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	10.000.000	10.000.000	0
1.03.11.2.02.11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	15.000.000	15.000.000	0
1.03.11.2.03	<b>Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>			
1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional Kab/Kota	10.000.000	10.000.000	0
1.03.11.2.03.03	Pebinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	37.500.000	37.500.000	0
1.03.11.2.03.04	Pebinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	14.000.000	14.000.000	0
1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	10.000.000	10.000.000	0
1.03.11.2.04	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>			
1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	15.000.000	15.000.000	0
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30.000.000	30.000.000	0
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	385.000.000	385.000.000	0
<b>XII</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>			
1.03.12.2.01	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</b>			
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kab/Kota	15.000.000	15.000.000	0
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/Kota	30.000.000	30.000.000	0



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU DPA		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	30.000.000	30.000.000	0
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang	60.000.000	60.000.000	0
1.03.12.2.02	<b><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	250.000.000	460.000.000	210.000.000
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.554.943.000	1.456.809.000	(98.125.000)
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	15.000.000	15.000.000	0
1.03.12.2.03	<b><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	140.000.000	180.600.000	40.600.000
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	100.000.000	100.000.000	0
1.03.12.2.04	<b><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	245.066.000	245.066.000	0

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

**TABEL III. 1 Kategorisasi Kinerja**

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Keterangan : Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018

Kerangka Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Rincian singkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

## B. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan :

### 1. Sasaran Kesatu :“Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel”

**Tabel III.2**  
**Realisasi Kinerja sasaran Kesatu**  
**Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP DPUPR	CC	B			
		Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada DPUPR	0	100			

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2023 Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan telah melakukan beberapa upaya dalam melaksanakan kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- I . Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- J . Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- K . Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
- L . Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemamanfaatan Jasa Konstruksi

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran “Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel” Tahun 2023:





Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023, ada ditemukan beberapa kendala dan hambatan akan tetapi untuk kegiatan penunjang SKPD telah dilaksanakan dengan baik. Jumlah alokasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran kesatu “Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel” adalah sebesar Rp. 15.881.339.882,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.595.470.719,00 dengan capaian kinerja mencapai 91,90%, melihat dari capaian kinerja yang mencapai nilai tersebut maka dalam kategorisasi kinerja kriteria penilaiannya adalah sangat baik. Kemudian pada Program Pengembangan Jasa Konstruksi memiliki anggaran sebesar Rp. 1.414.200.000,00 dengan realisasi Rp. 1.222.114.452,00 dan capaian kinerjanya mencapai 86,42%. Berikut rincian realisasi kinerja pada program/kegiatan:

**Tabel III.3**  
**Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Penunjang Urusan**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Jasa Konstruksi**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kinerja		Anggaran	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
I	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>			91,90	15.881.339.882,00	14.595.470.719,00
	<i>Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>					



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	63,51	300.000.000	190.549.807
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	100	25.000.000	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	100	25.000.000	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	100	25.000.000	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	100	25.000.000	25.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	100	78.502.000	78.502.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	92,95	130.000.000	120.836.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94	96,94	7.449.457.461	7.269.511.913
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	94,93	436.200.000	440.226.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	100	20.000.000	20.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2	75,90	28.000.000	21.252.250
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	94,95	175.000.000	174.037.100
<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>					
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	94,14	32.000.000	30.123.950
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	91,64	40.000.000	36.658.000



	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3	99,54	75.000.000	74.653.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	84,96	27.000.000	22.941.400
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7	100	61.920.000	61.920.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2	99,78	156.590.000	156.243.600
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	34,68	15.500.000	5.374.850
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	83,32	62.000.000	51.660.700
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	51,39	14.000.000	7.195.600
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6	97,06	73.854.000	71.685.774
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	0	156.080.000	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	20	92,69	87.600.000	81.205.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	93,71	35.000.000	32.797.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	92,92	80.000.000	79.931.700



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	55,75	20.000.000	1.115.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	99,14	300.000.000	297.400.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	99,99	66.358.873	66.358.150
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	99,09	55.000.000	54.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	90,54	471.000.000	426.447.043
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	100	20.000.000	20.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang diadakan	1	100	1.427.000.000	1.427.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang diadakan	15	99,97	136.369.050	136.330.200
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5	31,67	775.535.750	245.535.750
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	81,65	8.000.000	6.531.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	95,39	985.415.748	940.067.732
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	99,26	142.497.000	141.450.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	95,85	950.000.000	910.621.500
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Unit Kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	1	100	268.915.000	268.915.000



Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13	80,29	77.620.000	62.317.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Unit yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	4	100	238.375.000	238.375.000
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	92,22	25.680.000	23.680.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	99,83	199.870.000	199.520.000
<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>			<b>86,42</b>	<b>1.414.200.000,00</b>	<b>1.222.114.452,00</b>
<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>					
Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	82,39	20.000.000,00	16.477.000,00
Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang disiapkan	2	85,38	20.000.000,00	17.076.000,00
Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	89,54	10.000.000,00	8.954.000,00
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50	84,66	375.000.000,00	317.460.638,00



Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2	82,82	10.000.000,00	8.282.000,00
Fasilitasi Sertifikat Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersetifikasi	50	97,28	75.000.000,00	72.960.000,00
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	20	88,60	25.000.000,00	22.150.000,00
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1	85,64	25.000.000,00	21.411.000,00
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	10	91,32	42.200.000,00	38.538.537,00
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	10	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	3	50,54	25.000.000,00	12.635.000,00
Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	1	40,06	10.000.000,00	4.006.000,00



Penyusunan Data dan Informasi Potensi Resiko Investasi Insfrastruktur	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur	1	15,67	15.000.000,00	2.351.000,00
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1	56,25	10.000.000,00	5.625.000,00
Penyusunan Data dan Informasi Kebersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1	89,52	175.000.000,00	156.657.000,00
Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1	89,02	20.500.000,00	18.250.000,00
Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	1	54,35	15.000.000,00	8.153.202,00
Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	1	88,70	10.000.000,00	8.870.000,00
Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi	1	59,58	15.000.000,00	8.937.000,00
<b><i>Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</i></b>					
Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	1	7,65	10.000.000,00	765.000,00



Pebinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	20	88,33	37.500.000,00	33.122.000,00
Pebinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional	2	53,90	14.000.000,00	7.546.000,00
Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	1	40,10	10.000.000,00	4.010.000,00
<b><i>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i></b>					
Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	77,79	15.000.000,00	11.668.000,00
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	20	100,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2	96,42	385.000.000,00	371.210.075,00

## 2. Sasaran Kedua : "Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik".

**Tabel III.4**  
**Realisasi Kinerja sasaran Kedua**  
**Meningkatnya Konektivitas Wilayah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	36,60	36.50	99,73
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	51,25	51.25	100,00

**Tabel III.5**  
**Perkembangan Realisasi Kinerja sasaran Kedua**  
**Meningkatnya Konektivitas Wilayah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	34,67	36.50			
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	50,17	51.25			

Capaian kinerja diatas memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program, kegiatan dan subkegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Kedua "Meningkatnya Konektivitas Wilayah" adalah sebesar Rp. 131.347.055.599,00 dengan realisasi sebesar Rp. 113.838.564.961 dengan capaian kinerja mencapai 86,67%, melihat dari capaian kinerja yang mencapai nilai tersebut maka dalam kategorisasi kinerja kriteria penilaiannya adalah sangat baik. Berikut rincian realisasi kinerja pada sasaran yang kedua beserta dokumentasinya:

**Tabel III.6**  
**Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan**  
**sasaran Kedua Meningkatkan Konektivitas Wilayah**



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kinerja		Anggaran	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>			<b>86,67</b>	<b>131.347.055.599</b>	<b>113.838.564.961</b>
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	40	88,69	3.793.546.500	3.364.785.217
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen survey Kondisi Jalan/Jembatan	2	99,24	600.000.000	595.400.000
	Pembangunan Jalan	Panjang Pembangunan Jalan	0,988	89,71	9.717.500.000	8.717.500.000
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar	1	100	1.954.700.000	1.954.700.000
	Rekonstruksi Jalan	Panjang Rekonstruksi Jalan	11,01	89,72	83.918.816.600	75.289.886.142
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	6,9	99,96	3.334.062.199	3.332.579.000
	Pembangunan Jembatan	Panjang Pembangunan Jembatan	20	15,02	7.893.800.000	1.186.100.000
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Rehabilitasi Jembatan	15	91,38	1.276.900.000	1.166.750.000
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan	25	76,76	250.000.000	191.905.000
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	40	84,36	1.318.620.300	1.112.471.603
	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	40	94,20	6.150.460.000	5.794.263.000
	Pembangunan Jalan Strategis Desa	Panjang Pembangunan Jalan Strategis Desa	1,48	99,99	5.009.500.000	5.009.375.000
	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	Panjang Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	3,2	99,89	6.129.150.000	6.122.850.000



### Dokumentasi Program Kegiatan sasaran Kedua Meningkatnya Konektivitas Wilayah



### 3. Sasaran Ketiga: "Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten"

**Tabel III.7**  
**Realisasi Kinerja sasaran Ketiga**  
**Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
1	Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan terhadap RTRW	25,00	22,00	88,00

**Tabel III.8**  
**Perkembangan Realisasi Kinerja Sasaran Ketiga**  
**Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026



1	Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan terhadap RTRW	20,00	22,00			
---	--	------------------------	-------	-------	--	--	--

Ada 3 (Tiga) Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran ketiga "Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten" dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.592.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.783.255.499,00 dengan capaian kinerja mencapai 68,79%, program Penataan Bangunan Gedung mempunyai anggaran sebesar Rp. 24.848.472.300,00 dengan realisasi Rp. 23.493.545.798,00 dengan capaian kinerja mencapai 94,55% dan program Penataan Bangunan dan Lingkungannya mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.535.732.000,00 dengan realisasi Rp. 25.300.816.800,00 yang memiliki capaian kinerja 99,08%. Melihat dari capaian kinerja yang mencapai nilai tersebut maka dalam kategorisasi kinerja kriteria penilaiannya adalah sangat baik. Berikut rincian realisasi kinerja pada sasaran yang Ketiga beserta dokumentasi kegiatannya:

**Tabel III.9**  
**Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Sasaran Ketiga**  
**Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kinerja		Anggaran	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>			<b>68,79</b>	<b>2.592.475.000</b>	<b>1.783.255.499</b>
	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</b>					
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kab/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	18,84	15.000.000	2.827.000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan	2	0	30.000.000	0



	Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/Kota	Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2	0	30.000.000	0
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	6	0	60.000.000	0
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	21	43,04	460.000.000	198.004.940
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	28	77,02	1.456.809.000	1.122.158.779
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1	100	15.000.000	15.000.000
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	6	76,69	180.600.000	138.518.020
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang	1	84,85	100.000.000	84.850.100
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4	90,54	245.066.000	221.896.660



II	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>			<b>94,55</b>	<b>24.848.472.300,00</b>	<b>23.493.545.798,00</b>
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>					
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	40	86,64	554.165.000	480.164.948
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	200	96,62	18.941.605.300	18.302.567.850
	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	1	96,43	3.293.000	3.175.500
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	12	100	1.222.000	1.222.000
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	20	69,65	30.650.000	21.350.000
	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan Milik Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Bangunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	1	36,53	18.860.000	6.888.000



	Bantuan Teknis Bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Pengelola Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	1	100	130.000	130.000
	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kab/Kota	Jumlah Pemilik Pengelola Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	1	100	130.000	130.000
	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Pemilik Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang telah dilakukan Penilikan oleh Penilik Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	40	4,67	15.000.000	700.000
	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang telah dilakukan Pendaftaran oleh Pendaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	20	100	1.550.000	1.550.000
	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tunggal yang telah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	20	33,14	15.000.000	4.972.000
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten Kota yang dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7	88,68	5.266.867.000	4.670.695.500
<b>III</b>	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>			<b>99,08</b>	<b>25.535.732.000,00</b>	<b>25.300.816.800,00</b>
	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>					



Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1	95,45	533.040.000	508.757.100
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2	100	200.000	200.000
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2	99,20	24.991.732.000	24.790.542.200
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	4	93,75	1.080.000	1.012.500
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	4	31,51	9.680.000	305.000

### Dokumentasi Program Kegiatan sasaran Ketiga Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten





**4. Sasaran Keempat : "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat"**

**Tabel III.10**  
**Realisasi Kinerja sasaran Keempat**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	Persentase penduduk berakses air minum/air bersih	51,35	77,68	151,27
		Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	1,25	1,00	80,00
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	65,73	68,00	103,45
		Persentase drainase dalam kondisi baik	35,17	34,49	98,07

**Tabel III.11**  
**Perkembangan Realisasi Kinerja sasaran Keempat**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026



1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	Persentase penduduk berakses air minum/air bersih	58,41	77,68			
		Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	1,00	1,00			
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	65,39	64,96			
		Persentase drainase dalam kondisi baik	23,60	34,49			

Ada 6 (Enam) alokasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran ketiga "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat". Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai anggaran sebesar Rp. 16.639.369.763,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.613.939.800,00 dengan capaian kinerja mencapai 99,85%, Kemudian pada Program Pengembangan Permukiman mempunyai anggaran sebesar Rp. 13.301.745.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.122.503.600,00 dengan capaian kinerja mencapai 98,65%, program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp. 1.927.749.737,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.834.402.150,00 dengan capaian kinerja mencapai 95,16%, program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional sebesar Rp. 1.785.500.000,00 dengan realisasi sebesar 1.784.650.000,00 dengan capaian kinerja mencapai 99,95%, kemudian program Pengelolaan Pengembangan Sistem Drainase memiliki anggaran sebesar Rp. 2.089.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.089.500.000,00 dengan capaian kinerja mencapai 99,99%, program Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai anggaran Rp. 16.908.567.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.516.624.143,00 dengan capaian kinerja 97,68%. Melihat dari capaian kinerja 6 (Enam) Program tersebut maka dalam kategorisasi kinerja kriteria penilaiannya adalah sangat baik. Berikut rincian realisasi kinerja pada sasaran yang Keempat beserta dokentasi kegiatannya:



**Tabel III.12**  
**Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Sasaran Keempat**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Kinerja		Anggaran	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>					
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota</b>			<b>99,85</b>	<b>16.639.369.763,00</b>	<b>16.613.939.800,00</b>
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	98,24	1.151.811.000	1.131.574.200,00
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	1	99,66	656.700.000	654.467.600,00
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1000	99,96	6.563.469.763	6.560.779.000,00
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	50	99,98	1.065.550.000	1.065.380.000,00
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	10000	99,99	1.676.339.000	1.697.439.000,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	3062	100,00	2.904.500.000	2.904.500.000,00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan	13	100,00	2.599.800.000	2.599.800.000,00



		Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu				
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>			<b>98,65</b>	<b>13.301.745.000,00</b>	<b>13.122.503.600,00</b>
	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	17,5	98,66	13.300.785.000	13.121.543.600
	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang diawasi di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	35	100	730.000	730.000
	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6	100	230.000	230.000
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>			<b>99,95</b>	<b>1.785.500.000,00</b>	<b>1.784.650.000,00</b>
	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPS/SPA/TPS 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	1	99,86	480.000.000	479.350.000
	Pembangunan TPA/TPS/SPA/TPS 3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	300	99,98	1.305.500.000	1.305.300.000
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>			<b>95,16</b>	<b>1.927.749.737,00</b>	<b>1.834.402.150,00</b>



	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	76,34	377.721.850	288.388.650
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	2	88.74	35.627.887	31.613.500
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	629	100	985.000.000	985.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	2	100	150.000.000	150.000.000
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Unit yang disediakan untuk Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1	100	79.550.000	79.550.000
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Unit yang disediakan untuk Penyedotan Lumpur Tinja	0	100	100.000.000	100.000.000
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Panjang Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	18	100	199.850.000	199.850.000
<b>V</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( SDA )</b>			<b>97,68</b>	<b>16.908.567.500,00</b>	<b>16.516.624.143,00</b>
	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Konstruksi Bendungan,	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama	1	100,00	20.270.000,00	20.270.000,00



Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Perkotaan dan Pengaman Pantai				
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	1	100,00	20.270.000,00	20.270.000,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1	99,83	120.270.000,00	120.070.000,00
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1	97,94	905.154.900,00	886.489.743,00
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1	100,00	291.000.000,00	291.000.000,00
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	2	99,97	685.000.000,00	684.800.000,00
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	2	99,99	3.614.850.000,00	3.614.350.000,00
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1	100,00	20.270.000,00	20.270.000,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20	100,00	36.240.000,00	36.240.000,00
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1	98,25	20.270.000,00	19.915.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	20	100,00	37.100.000,00	37.100.000,00



	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1	-	-	-
	<b><i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i></b>					
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1	99,71	736.139.600,00	734.040.000,00
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0,5	100,00	487.500.000,00	487.500.000,00
	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	1	100,00	1.915.425.000,00	1.915.425.000,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2	100,00	199.900.000,00	199.900.000,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	2	86,29	1.459.800.000,00	1.259.700.000,00
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	10	97,04	5.739.108.000,00	5.569.284.400,00
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,5	-	-	-
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	5	100,00	600.000.000,00	600.000.000,00
<b>VI</b>	<b><i>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</i></b>			<b>99,99</b>	<b>2.089.600.000,00</b>	<b>2.089.500.000,00</b>
	<b><i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i></b>					
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1	100	99.900.000	99.900.000



Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1000	100	790.450.000	790.450.000
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	2000	100	299.800.000	299.800.000
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	500	100	199.800.000	199.800.000
Operasi dan Pemeliharaan Drainase	Panjang Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	500	100	200.000.000	200.000.000
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1000	99,97	299.800.000	299.700.000
Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	2000	100	199.850.000	199.850.000

**Dokumentasi Program Kegiatan sasaran Keempat  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat**

**TPS 3R**



**BANK  
SAMPAH**







### C. Kegiatan yang Dibatalkan dan Hambatannya

Tabel Daftar Kegiatan yang dibatalkan  
Dan Hambatannya

NO.	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Hambatan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota</b>	
		• Rekonstruksi Jalan Desa Mahanjandau - Kel. Mangkatip (Ruas 130) (DAK)	• Penghentian Kontrak karena Banjir dan Kelalaian Penyedia dalam melaksanakan Proses Pekerjaan
		• Rekonstruksi Jalan Kel. Mangkatip - Dusun Kalanis Murung (Ruas 128) (DAK)	• Penghentian Kontrak karena Banjir dan Kelalaian Penyedia dalam melaksanakan Proses Pekerjaan
		• Rekonstruksi Jalan Ugang Sayu-Palu Rejo (Ruas 103) (DAK)	• Penghentian Kontrak karena Kelalaian Penyedia dalam melaksanakan Pekerjaan Pengaspalan
		• Rekonstruksi Jalan Yahya Tagan	• Penghentian Kontrak karena Kelalaian Penyedia dalam melaksanakan Pekerjaan Pengaspalan



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembuatan Jembatan Desa Sungai Jaya</li><li>• Pembangunan Median Jalan Soekarno - Hatta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batal Tender karena Terbatasnya Rencana waktu Pelaksanaan Pekerjaan</li><li>• Batal Tender karena Terbatasnya Rencana waktu Pelaksanaan Pekerjaan</li></ul>
2	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I.R Desa Bintang Kurung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batal Tender karena Terbatasnya Rencana waktu Pelaksanaan Pekerjaan</li></ul>
3	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lanjutan Pembangunan Kantor Inspektorat Kab. Barsel</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batal Tender karena Terbatasnya Rencana waktu Pelaksanaan Pekerjaan</li></ul>



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 bisa disimpulkan sangat berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut dibuktikan dengan nilai capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan keberhasilan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan tidak akan berbangga diri. Karena semakin tahun tantangan dan permasalahan semakin kompleks.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKIP Tahun 2023, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melakukan langkah-langkah guna pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.



# LAMPIRAN - LAMPIRAN